

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Penulisan Judul

Involusi politik¹ atau Frozen demokrasi(demokrasi beku) merupakan kata kunci dalam sebuah masa transisi demokrasi yang sangat krusial tentang keberlanjutan dari suatu konsolidasi demokrasi itu sendiri. Transisi demokrasi atau demokratisasi di Rusia merupakan kasus yang unik dan banyak mengandung pro dan kontra baik di dalam dan luar negeri, seperti halnya kekhawatiran Collin Powel tentang semakin memprihatinkannya demokratisasi di Rusia. Kekhawatiran Collin Powell dan beberapa pengamat politik dunia mengenai perkembangan Rusia ini sangat beralasan karena secara fakta involusi politik Rusia dewasa ini benar sudah menjadi rahasia umum dan khawatir akan membuat tercorengnya demokrasi itu sendiri.

Perkembangan demokratisasi di Rusia yang menuju kearah frozen demokrasi ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk dijadikan pengalaman berharga dalam mempersiapkan suatu transisi demokratisasi supaya tidak terjebak dalam hal serupa.

Transisi demokratisasi yang menuju kearah involusi politik atau frozen demokrasi merupakan keadaan yang menjungkirbalikan suatu keadaan yang seharusnya menuju arah yang *civility* menuju kedalam lingkaran setan dari sebuah rezim yang tidak seimbang dengan pertumbuhan *civil society*. *Civil*

¹ Involusi politik merupakan masa transisi demokratisasi sendiri

berdaya dan tidak ada pengaruhnya. Keadaan seperti inilah yang menjadi rujukan keadaan demokratisasi Rusia yang mengawatirkan.

Sebuah pertanyaan pernah terlontar oleh orang Yunani beberapa abad yang lalu, yakni apa yang lebih baik bagi suatu negara adanya pemimpin yang baik atautkah suatu system hukum yang baik?² Ini merupakan sebuah pertanyaan tentang bagaimana nasib dari suatu perkembangan negara yang bila dijawab dengan sudut pandang *das sollen* keduanya tidak bisa dipisahkan baik dalam pemerintahan yang demokratis atau pun dalam pemerintahan monarki. Jawaban dari pertanyaan tersebut kalau terkena sebuah kata yaitu “invulasi” dalam keadaan yang bagaimana baiknya pun dalam kenyataannya pasti akan menuju kearah suatu keadaan *uncivility*. Jadi invulasi politik yang dalam hal ini dalam kontek demokratisasi merupakan suatu *icon* yang perlu di ungkap secara komprehensif dengan tetap pada acuan sebab-sebab *inherensi*, *kontigensi* dan *historical*.

Invulasi politik atau *frozen democracy* di Rusia ini merupakan momok yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan masyarakat Rusia yang dalam decade terakhir ini mulai mengecap angin segar demokratisasi. Pengungkapan invulasi atau frozen demokratisasi di Rusia ini sangat penting untuk mengungkapkan tentang realitas politik masyarakat Rusia pasca terbebas dari cengkraman komunis yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Rusia.

¹ Istilah yang di kembangkan oleh Geertz untuk menyebutkan suatu perkembangan dalam John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia gerakan social dan P.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002, hal xviii

B. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- Untuk lebih memahami proses demokratisasi yang terjadi di Republik Federasi Rusia yang memasuki tahap rekonsiliasi demokrasi setelah bebas dari cengkraman komunis.
- Untuk menambah wawasan tentang pengaruh proses demokratisasi yang dimulai dari pemerintahan yang otoriter komunis terhadap masyarakatnya, serta pengaruh masyarakat yang asalnya berwacana komunis terhadap demokratisasi itu sendiri, serta memperkenalkan kepada khalayak umum tentang proses demokratisasi di Rusia.
- Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Gelombang demokrasi dunia ketiga berjalan mulus seperti halnya bola salju yang terus menggelinding semakin besar itulah kiranya analogi yang tepat untuk menggambarkan semakin berkembangnya paham demokrasi di decade 80-90an. Demokratisasi tersebut melanda berbagai belahan benua di dunia, terutama sekali menerpa tatanan masyarakat negara-negara berkembang dan negara-negara yang awalnya otoriter. Tak pelak lagi Uni Soviet sebagai negara kampiun komunis terkena pengaruh tersebut dan mem

Uni Soviet sebagai negara-negara-negara-negara dari Uni Soviet ter

Created with

dalam kerangka demokratisasi sebagai suatu pilihan. Fajar baru demokratisasi ini terbit di Rusia ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis Uni Soviet tahun 1985, dalam hal ini Gorbachev segera melancarkan pembaharuan dengan program restrukturisasi (perestroika) dan keterbukaan (glasnot) di Uni Soviet, yang terdiri dari Rusia dan 14 republik lainnya

Konsep perestroika yang diungkapkan oleh Gorbachev ini merupakan embrio dari pecahan Uni Soviet dan sekaligus kunci pintu perkembangan demokrasi di Rusia. Peluncuran perestroika bukanlah tidak ada alasan yang jelas tetapi Gorbachev melihat keadaan Uni Soviet yang mengalami kelembaman perkembangan ekonomi ekstensif sedang menuju jalan buntu dan stagnasi ekonomi. Di bidang social budaya dan politik keadaan masyarakat berjalan tidak menentu partai komunis sebagai organ pendamping dan pengarah kebudayaan semakin tidak bisa memainkan perannya.

Bimbingan partai mengendor, dan inisiatif menghilang dari ajang proses social yang vital. Setiap orang mulai melihat stagnasi dikalangan kepemimpinan, dan pelanggaran terhadap proses perubahan yang wajar mewabah. Pada saat tertentu, keadaan ini menyebabkan prestasi Politbiro dan Sekretariat Komite pusat, pemerintah, dan seluruh jajaran komite sentral serta aparat partai menjadi lebih buruk.³

Keadaan diatas membuat semakin mengiringi berakhirnya masa kejayaan Uni Soviet dikarenakan sudah tidak adanya lagi penyatuan

³Gorbachev Mikhail, *Perestroika Pemikiran Baru Untuk Negara Kami dan*

pemikiran dari tingkat bawah dan atas, sehingga keselarasan yang kuat antara rakyat dan para elit tidak bisa dipertahankan lagi dan ini sangat berakibat fatal karena dengan tidak adanya keselarasan pemikiran tersebut merupakan awal dari disintegrasi yang dilakukan oleh negara bagian Uni Soviet. Runtuhnya tembok Berlin merupakan pertanda simbolik dari pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara kesatuan.

Rusia sebagai negara pecahan dari Uni Soviet yang secara kebudayaan merupakan representatif besar dari Uni Soviet yang tidak ketinggalan memasuki kawasan demokratisasi sebagai pilihan dari system pemerintahannya. Rusia merupakan negara bagian terbesar dari Uni Soviet menyikapi hal ini dengan melanjutkan konsep pembaruan atau perestroikanya Gorbachev dengan di pimpin oleh Boris Yeltsin.

Dengan konsep Top-down pemerintahan Rusia yang membenahi negerinya dengan membangun konsep demokrasi. Pembangunan konsep demokrasi ini diimplementasikan dengan membangun system baru yaitu dengan dibentuknya Republik Federasi Rusia dengan dasar demokratisasi. Syarat-prasarat dari demokratisasi ini diwujudkan oleh Rusia dengan membangun bangunan demokrasi dalam sistem politiknya :

a. Falsafah Negara

Rusia membangun pemerintahannya dengan system Republik Federasi dengan pengakuan akan kemajemukan ideology sebagai perbaikan dari system komunis yang mengharuskan homogenitas dalam ideology. Selain itu Rusia

sangat pluralis dengan membuat suatu konstitusi yang menggambarkan kebebasan dan hak asasi manusia.

b. Pelaksanaan Kekuasaan Negara

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang tentunya dengan membawa panji demokrasi, Rusia dengan komando Yeltsin membagi kekuasaannya kedalam tiga kekuasaan secara terpisah dengan membentuk badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Badan eksekutif Rusia di kepalai oleh Perdana Menteri dengan dibantu wakilnya dan menteri-menteri federal, sedangkan legislative dibagi menjadi dua kamar yaitu dewan federasi dan дума negara dan kekuasaan yudikatif dijalankan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi

c. Partai Politik

System partai yang tadinya system tunggal dengan ideologi komunisnya yang kental, sejak berdirinya Rusia dengan membawa panji demokrasi sistim kepartaian menjadi sistem multi partai.

d. Pemilu

Sebagaimana negara demokrasi pada umumnya, Rusia sebagai negara demokrasi baru menyelenggarakan pemilu sebagai representasi demokrasi, dengan melakukan pemilihan presiden pertamanya tanggal 12 juni 1991, kemudian pemilihan selanjutnya tahun 1996, 2000, 2004 dan pemilihan

e. Privatisasi ekonomi

Keadaan perekonomian Rusia sejak terpisah dari Uni Soviet mengalami penurunan yang sangat tajam dan sangat memprihatinkan, dengan melihat tersebut Yeltsin mengambil kebijakan tentang legalisasi privatisasi (pertengahan 1994, 70% sumber perekonomian ditangan swasta) dalam usaha perekonomian dengan harapan untuk lebih meningkatkan perkembangan ekonomi yang semakin ambruk serta untuk meningkatkan kompetisi ekonomi dalam liberalitas.

Konsolidasi demokrasi yang dibangun oleh regim demokrasi pertama Rusia meskipun sudah terbentuk lembaga negara yang merupakan representasi demokrasi, bahkan sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, tetapi perjalanan demokrasi di Rusia ini belum bisa berjalan dengan optimal atau stabil. Indikasi di atas mengisyaratkan Indeks Freedom House sebagai lembaga yang menyoroti masalah demokrasi memberikan nilai 5 untuk kebebasan masyarakat sipil di Rusia dengan rentang 1 untuk indeks paling tinggi dan 7 untuk indeks paling rendah, selain itu Freedom House memberikan status partly free untuk indeks demokrasi keseluruhan, padahal dilihat di satu sisi partisipasi masyarakat Rusia sangat tinggi hal ini bisa dilihat partisipasi pemilu di Rusia selalu berada diatas 60 persen dari hak pilih. Selain itu kekuatan trias politika seperti sudah dijelaskan di atas sudah terakomodir dengan baik dalam lembaga pemerintahan. Dengan melihat indikasi di atas tampaknya rentang demokrasi yang sudah tertanam sepanjang pemerintahan Yeltsin tampaknya tidak ada kemainan yang berarti dal

demokrasi dan bahkan tampaknya kemandegan demokratisasi atau involusi politik menghantui Republik Federasi Rusia.

D. Rumusan Masalah

Mengapa konsolidasi demokrasi di Rusia dibawah kepemimpinan Borris Yeltsin mengalami kemandegan ?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran untuk menganalisa kemandegan konsolidasi demokrasi di Rusia ini menggunakan pendekatan teori demokrasi dan budaya politik.

Demokrasi

Kalimat singkat yang menggambarkan suatu kata demokrasi tidak lebih dari suatu ungkapan pemerintahan oleh rakyat, tetapi meskipun demikian implementasi di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan sendiri. Perjalan demokrasi ini dalam perputarannya bersifat *open ended* dan tentu berubah sejalan dengan kebudayaan manusia yang terus bergerak dinamis penuh perubahan, intrik dan siasat.

Istilah demokrasi berasal dari kata demos(rakyat) dan kratos(pemerintahan) yang kalau dilihat secara terminology sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Sumbangan pemikiran lainnya mengenai demokrasi dilontarkan oleh Dahl yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sitem politik. Menurut Dahl demokrasi yaitu sistem politik yang

dimaksud diatas merupakan responsive yang mensyaratkan warga negara yang memiliki kesempatan untuk :

- Merumuskan pilihan mereka
- Menyampaikan pilihan mereka kepada sesama warga negara maupun pemerintah baik secara perorangan maupun kelompok
- Dalam menyampaikan pilihan tersebut diperlakukan sama oleh pemerintah tanpa memandang isi maupun sumber pilihan tersebut.

Ketiga kesempatan di atas pada gilirannya, tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan berikut ini :

1. Kebebasan untuk dan menjadi anggota organisasi
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat
3. Hak memilih
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan
6. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara
7. Sumber-sumber informasi alternatif
8. Pemilihan umum yang bebas dan adil
9. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya⁴

⁴ Robert A. Dahl, *Poliarchy: Participation and Opposition*, (New Heaven Press 1971), hal. 2, dalam *Golden Age of Democracy*, pp. 111

Pada prinsipnya, kedelapan kondisi yang dipaparkan oleh Dahl membentuk definisi kita tentang demokratisasi politik. Namun untuk kepentingan praktis akan berguna untuk tiba pada definisi yang lebih ringkas yang merangkum elemen-elemen dasar demokrasi politik. Kedelapan kondisi tersebut mencakup tiga dimensi utama demokrasi politik, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil.⁵ Dengan latar belakang ini, demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah system pemerintahan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut :

- Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintahan yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.
- Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok social (dewasa) utama yang disingkirkan.
- Tingkat kebebasan politik dan sipil-kebebasan berpendapat, kebebasan press, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi cukup untuk memastikan integrasi partisipasi dan kompetisi politik.⁶

⁵ Hans-Jorgen Nielsen Grouped eight 'conditions in a similar way in *Den Chilenske Transitionsproces(The Chlean Process of transition)* (Aarhus : University of Aarhus Institute of political Siences,1991), hal 5, dalam Georg Sorenson, *op.cit*

⁶ Larry Diamond, Juan J. Linz, dan Seamus Lipset(eds), *Democracy in Developi*

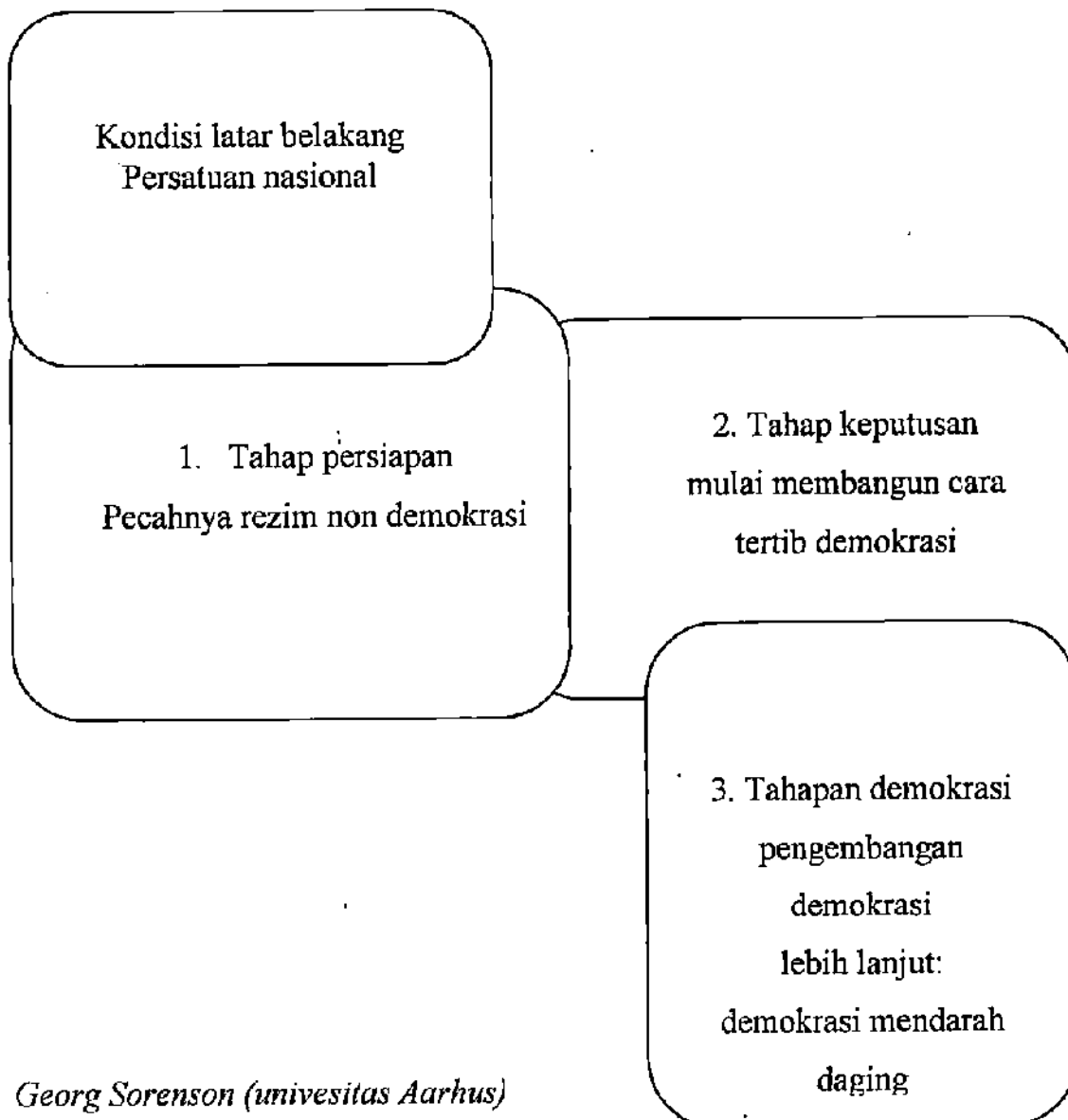
Proses Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Transisi dari pemerintah non-demokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Pada kasus tipikal kontemporer, permulaan proses ditandai dengan terjadinya krisis dan akhirnya perpecahan pada tubuh rezim non-demokratis. Jika transisi menuju demokrasi diawali dengan kesadaran dari rezim otoriter bahwa mereka harus meninggalkan kantornya, maka tahapan ini akan diakhiri dengan pembentukan sebuah pemerintahan yang baru berdasarkan pemilihan yang bebas.

Namun, proses tidak sampai berakhir disitu. Rezim yang baru seringkali menjadi demokrasi yang terbatas, lebih demokratis dari pada pemerintah sebelumnya, namun belum demokratis sepenuhnya. Beberapa tahapan pendalaman demokrasi (*democracy deepening*) mungkin dibutuhkan sebelum tahapan berikutnya dicapai. Dan rezim masih harus dikonsolidasikan, yang akan terjadi ketika demokrasi dilihat oleh aktor-aktor politik besar sebagai satu-satunya permainan dikota (*the only game in town*). Seringkali terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapan ini.⁷

Pandang Rostow mengenai transisi demokrasi melihat perjalanan transisi demokrasi ini dalam beberapa tahapan seperti dibawah ini :

⁷Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Pustaka pelajar, Yogyakarta 2003.



Dengan persatuan nasional sebagai satu-satunya kondisi latar belakang, tahap pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah tahapan persiapan (preparatory phase). Tahapan ini berisi apa yang pada awalnya disebut Rustow sebagai perjuangan politik yang panjang dan tidak meyakinkan. I

Demokrasi mungkin bukan menjadi tujuan utama mereka; demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lain atau dampak ikutan dari perjuangan mencapai tujuan lainnya, seperti masyarakat yang setara, distribusi kesejahteraan yang lebih baik, peluasan hak-hak dan kebebasan, dan sebagainya

Tahap kedua adalah tahap keputusan, yang berisi sebuah keputusan yang dirundngan oleh sebagian dari para pemimpin politik untuk....melambangkan beberapa aspek krusial dari prosedur demokrasi.⁸Tahap terakhir konsolidasi adalah proses dimana lembaga dan praktek demokrasi dalam budaya politik. Tidak hanya para pemimpin politik tetapi juga mayoritas aktor politik dan masyarakat yang melihat praktek demokrasi sebagai bagian dari hak dan tata tertib. ⁹ Tahapan yang diajukan Rustow ini tidak selalu berjalan seperti halnya urutan di atas akan tetapi dalam perkembangan atau dalam realitasnya tahapan ini akan berjalan dengan tumpang tindih.

Involusi atau Kemandegan Demokrasi (Demokrasi Beku)

Dalam setiap perjalanan transisi demokrasi selalu menyisakan masalah-masalah mendasar yang sangat umum pada sebuah negara yang baru memasuki irama demokratisasi. Salah satunya masalah yang terjadi yaitu terciptanya involusi politik atau frozen demokrasi. Seorang teoritisi politik dari gugusan negara-negara Skandinavia, George Sorensen, menyusun dan sekaligus mengembangkan konsep demokrasi beku atau frozen demokrasi untuk menggambarkan suatu kondisi masyarakat dimana sistem demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu

⁸ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan prospek dalam Si*

karena berbagai kendala yang ada.¹⁰ Terry Lynn mendefinisikan demokrasi beku adalah demokrasi yang didominasi oleh elit yang tidak ingin menjalankan reformasi subsatansif yang menguntungkan sebagian masyarakat miskin.¹¹

Indicator-indikator dalam mengukur demokrasi beku antara lain:

- Ambruknya perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun lokal
- Macetnya proses pembentukan masyarakat warga (*civil society*)

Konsep *Civil society* sering diartikan dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani (selanjutnya digunakan istilah masyarakat sipil). Masyarakat sipil dalam konteks negara yang demokratis meliputi pelbagai pranata, seperti press yang bebas dan bertanggung jawab, berkembangnya organisasi non pemerintah (ornop) yang berposisi secara loyal kepada pemerintah, merdekanya kelompok agama dan adat, dan macam sebagainya. Dalam iklim demokrasi yang sedang tumbuh kekuatan *civil society* merupakan kekuatan yang sangat potensial sebagai kekuatan pengimbang (checks and balance) kekuasaan negara, serta ikut kerja sama mewujudkan kearah yang lebih demokratis.¹²

- Konsolidasi sosial politik yang tidak pernah mencapai soliditas namun cenderung semu
- Penyelesaian masalah masalah social-politik-hukum yang tidak pernah tuntas yang diwariskan oleh rezim-rezim pendahulu.¹³

¹⁰ John markoff, *op.cit*, hal xviii

¹¹ Georg Sorensen, *op.cit*, hal 274

¹² Analisis CSIS, *Lima Tahun Reformasi: Proses Demokrasi yang Lamban*, CSIS Tahun XXXII/2003 no 2, Jakarta 1993

¹³ John Markoff, *op.cit*, hal xix

Merujuk dari paparan di atas tampaknya arus demokrasi yang sedang terjadi di Rusia tidak semulus yang telah dipaparkan diatas. Kompetisi, partisipasi serta tingkat kebebasan politik sipil di Rusia masih belum bisa dirasakan. Selama perjalanan demokrasi di bawah Yeltsin implementasi demokrasi liberal tidak pernah terwujud sepenuhnya, dominasi kekuatan presiden sangat mendominasi. Bahkan kekuasaan presiden sangat besar sehingga kekuatan penyeimbang dalam kelembagaan negara serta kekuatan *civil society* tidak bisa berbuat banyak. Keadaan ini menimbulkan ketimpangan social politik selama perjalanan demokrasi di bawah Yeltsin.

Tahapan transisi demokraasi di Rusia berjalan dengan starting point runtuhnya Uni Sovietyang nota bene merupakan kampiun komunisme yang secara ideology sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Setelah runtuhnya Uni Soviet pemerintahan dilanjutkan oleh rejim Yeltsin tahun 1991 yang mencoba menanamkan nilai-nilai demokratis sesuai dengan persepsinya terhadap demokrasi sekaligus dengan membuat undang-undang Republik Federasi Rusia yang mencerminkan pemerintahan demokratis dengan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang merepresentasikan trias politika. Akan tetapi tahan-tahapan yang dilalui Rusia di bawah pemerintahan Yeltsin belum bisa menunjukkan konsolidasi yang menuju perubahan yang signifikan terhadap demokrasi akan tetapi menuju kearah

Budaya Politik

Sistem politik merupakan budaya manusia yang selalu dinamis sejalan dengan perjalanan hidup manusia. Definisi tentang kultur politik memang banyak dan beraneka ragam. Roy Macridis, menulisnya sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama.¹⁴ Kebudayaan politik meliputi sikap-sikap dari warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan dan politiknya. Dan untuk menilai serta untuk memperbandingkan kebudayaan politik ada beberapa ukuran-ukuran, antara lain identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi berprestasi, keyakinan berprestasi dan persamaan, efektifitas politik, dan kepercayaan pada pemerintahan.¹⁵

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, kita dapat menggolongkan orientasi-orienatsi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan warga negaranya, atau dengan kata lain, kita bisa menggolongkan kebudayaan politiknya. Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting), dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik kita sebut berbudaya politik partisipan. Orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam dunia politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan, kita sebut berbudaya politik subyek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya

¹⁴ Gabriel A. Almond dan Sidney Verbs, *Budaya Politik ; tingkah laku politik dan birokrasi di lima negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1990

pemerintahan dan politik. Orang-orang dari golongan ketiga ini disebut berbudaya politik parokhial.¹⁶

Berdasarkan proporsi dari ketiga golongan itu dalam suatu system politik, bisa dibuat tiga model tentang kebudayaan politik, atau model tentang orientasi terhadap pemerintahan dan politik. Model pertama adalah masyarakat demokratis industrial, di mana jumlah partisipan mencapai 40 – 60 % dari penduduk dewasa. Jumlah subyek kurang lebih 30%, sedangkan golongan parochial kira-kira 10%. Terdapat banyak aktivis politik, publik peminat politik serta kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru.¹⁷

Model kedua adalah system otoriter hanya sebagian industrial dan modern. Meskipun terdapat organisasi politik beberapa partisipan politik, seperti mahasiswa dan kaum intelektual, menentang system itu dan berusaha merubahnya melalui tindakan-tindakan persuasive atau protes yang lebih agresif, pengusaha dan tuan tanah mendiskusikan tentang politik dan ikut dalam kegiatan lobbying. Tetapi sebagian besar rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Kaum parochial sedikit sekali kontaknya dengan system politik.¹⁸

Model ketiga adalah system demokratis pra industrial, yang sebagian besar warga negaranya hidup di pedesaan dan buta huruf. Dalam negara ini

hanya sedikit partisipan, yang terutama terdiri dari professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah.¹⁹

Setelah memasuki era demokrasi dibawah pemerintahan Yeltsin, pola kebudayaan politik masyarakat Rusia masih belum menciptakan situasi demokrasi yang diharapkan, bahkan kalau digolongkan kedalam tiga model diatas tampaknya era demokrasi Rusia tetap berada dalam dataran model otoriter. Kebudayaan politik Rusia yang sangat lembam tersebut disebabkan pengalaman sepanjang sejarah Rusia tidak pernah mengalami pengaruh dari faham-faham demokrasi atau sejenisnya yang mengutamakan kebebasan sipil. Sehingga dalam dataran demokratis pun masyarakat Rusia baik dalam pandangan Rulling class maupun grassroot tidak mempunyai sikap demokratis yang memungkinkan tumbuhnya demokrsi dengan cepat, dengan kata lain masih butuh waktu penyesuaian budaya.

F. Hipotesa

- a. Involusi atau kemandegan demokrasi di Republik Federasi Rusia disebabkan telalu kuatnya kekuasaan presiden dalam kedudukannya di pemerintahan
- b. Involusi atau kemandegan demokrasi di Republik Federasi Rusia disebabkan budaya politik masyarakat Rusia sendiri yang apatis terhadap demokratisasi itu sendiri

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang bisa diperoleh dengan menggunakan studi literature terhadap bahan-bahan yang digunakan yang berasal dari :

- buku-buku literature yang berkenaan dan sesuai dengan objek studi ini
- jurnal-jurnal ilmiah dan majalah yang reviewnya kerkaitan dengan masalah-masalah yang relevan dengan studi ini
- artikel-artikel ilmiah, baik yang dimuat oleh Koran maupun dalam internet

H. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan studi ini berangkat dari konsolidasi demokrasi di Republik Federasi Rusia dibawah pemerintahan Boris Yeltsin (1991-1999).

I. Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.A Alasan Pemilihan Judul

I.B Tujuan Penulisan

I.C Latar Belakang Masalah

I.D Rumusan Masalah

I.E Kerangka Dasar Pemikiran

I.F Hipotesa

I.G Teknik Pengumpulan Data

I.H Jangkauan Penulisan

I.I Sistematika Penulisan

BAB II SEJARAH SINGKAT RUSIA

II.A Gambaran Umum Rusia

II.B Kekaisaran Rusia Raya

II.C Rusia dalam Uni Soviet

BAB III PROSES DEMOKRASI RUSIA

III.A Kondisi Latar Belakang

III.B Tahap Persiapan Demokrasi

III.C Tahap Keputusan

III.D Tahap Konsolidasi

BAB IV KEMANDEGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI RUSIA

IV.A Super Presidensialisme

1. lemahnya kekuatan legislative
2. korupsi merajalela
3. lemahnya kekuatan ekonomi
4. kebebasan press

IV.B Apatisme Budaya Politik Rusia

1. karakter budaya politik Rusia
2. lemahnya partisipasi

BAB V KESIMPULAN